

**PERAN PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN DALAM  
PENGEMBANGAN USAHA MIRKO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM)**

**SKRIPSI MINOR**

Oleh:

**ISNA FADHILLAH**

**NIM : 0504163155**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019**

**PERAN PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN DALAM  
PENGEMBANGAN USAHA MIRKO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM)**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memporoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ISNA FADHILLAH**

NIM : 0504163155



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN  
DALAM PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

Oleh:

**ISNA FADHILLAH**  
NIM 0504163155

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi  
D-III perbankan Syariah

Dr. Marliyah, MA  
NIP. 197601262003122003

Dr. Aliyuddin Abdul, LC, MA  
NIP. 196506282003021001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul :Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 12 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yenni Samri J Nst, MA  
NIP. 197907012009122003

Rahmi Syahriza, S.Thi.,MA  
NIP. 198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Marliyah, M. AG  
NIP. 196706072000031003

Dr.Yenni Samri J Nst, MA  
NIP. 197907012009122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isna Fadhillah  
Nim : 0504163166  
Program Studi : D-III Perbankan Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang saya buat dengan judul : **“PERAN PT BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”** adalah asli (orisinil) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimana pun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa tugas akhir yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dicabut/dibatalkan.

Medan, 26 Juni 2019  
Yang menyatakan

**Isna Fadhillah**  
NIM. 0504163155

## IKHTISAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala serta solusi dalam mengembangkan UMKM di Medan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan analisisnya adalah analisis deskriptif kualitatif. Peneliti pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari tiga hal, yaitu a) Tersedianya produk pembiayaan UMKM, b) Melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta c) *Capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah. Hambatan BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Medan adalah: a) Manajemen yang belum teratur sehingga dapat menyebabkan kerugian pengusaha, baik internal maupun eksternal, b) Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan terlalu besar sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk meminjam uang di bank, serta c) Adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan bank konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil yang menyebabkan terjadinya persaingan di antara bank tersebut. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup, mengecilkan nilai agunan, melakukan promosi serta analisa yang baik dan secara benar sebelum memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Adapun saran dari penelitian ini adalah bank syariah harus lebih fokus dalam mengembangkan UMKM, bank syariah juga harus memberikan pendamping dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam hal manajemen keuangan, teknik produksi, serta teknologi informasi untuk masuk ke pasar global, dan bagi para pelaku UMKM harus lebih kreatif dalam membuat produk agar mampu menembus pasar internasional.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Pimpinan terbaik sepanjang zaman dan tauladan bagi umat manusia.

Menyelesaikan tugas akhir ini merupakan syarat yang harus di laksanakan oleh setiap mahasiswa/mahasiswi untuk menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Diploma dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr. Marliyah, MA selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Terwujudnya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewah Papa dan Mama yang senantiasa memberi kasih sayang, doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Andry Soemitra, Ma, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc.Ma, selaku ketua program studi D III Perbankan Syariah.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan D III Perbankan Syariah.
5. Seluruh staf dan pegawai di Bank PT. BPRS Al-Wasshliyah Medan, yang sangat membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman Alumni SMK-BM Panca budi Medan Asura, Mamski, Kikot, Pelong, Atoimah, Elvy, Acol, Sadip, Oncom, Putri indah/ndut, Remcok, Icewe, Abol, Mak win, Dindot, Capong, Ucok, Congor, dan teman yang lainnya yang gak bisa aku sebutkan 1 kelas soalnya nanti penuh kali skripsi penulis. Yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Sahabat terbaikku Adel, Afifah, Tia, Novia, dan Teman-teman seperjuangan di kelas A D III Perbankan Syariah stambuk 2016, yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi penulis. “Miss U so much” terima kasih untuk kebersamaan selama 3 Tahun.

Medan, 24 Juni 2019  
Penulis

Isna Fadhillah  
NIM. 0504163155



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSERTUJUAN</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sumber Data	7
G. Sistematika Pembahasan	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran	11
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	12
1. Tujuan Pendirian BPRS	13
2. Kegiatan BPRS Yang Dilarang	14
3. Produk-produk BPRS	14

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	18
1. Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	19
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	21
3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	22
4. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	23

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

A. Sejarah Bank Al-Washliyah Medan	25
B. Visi dan Misi Perusahaan	26
C. Produk-Produk Bank Al-Washliyah Medan	26
D. Struktur Organisasi Bank Al-Washliyah Medan	29

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. TEMUAN PENELITIAN	
1. Peran PT. BPRS Al-Washliyah dalam Mengembangkan UMKM	30
2. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	33
3. Solusi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	35
B. PEMBAHASAN PENELITIAN	
1. Peran PT. BPRS Al-Washliyah dalam Mengembangkan UMKM	38
2. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	40
3. Solusi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	42

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan 44

B. Saran 45

**DAFTAR PUSTAKA 47**

**RIWAYAT HIDUP 48**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Bank syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peran ini terlihat pada usaha mereka membantu UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.<sup>1</sup> UMKM juga memiliki posisi yang penting karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,5% dari total jumlah usaha Indonesia.

Perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini sudah sangat baik. Wajar bila UMKM menjadi focus pembiayaan perbankan syariah. Sektor UMKMM bahkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sama seperti UMKM, perbankan syariah yang selama ini seolah ditepikan justru menunjukkan perkembangannya saat krisis.

---

<sup>1</sup>Sri Maryati, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pendesaan di Sumatera Barat*, Jurnal Of Economic and Economic Education Vol. 3, No. 1 (1-17), 2014.

Dalam konteks Kota Medan misalnya, pertumbuhan perbankan syariah sangat baik. Bank syariah yang turut berperan dalam membangun Kota Medan, misalnya BRPS yang intens memberikan pembiayaan kepada UMKM sebagai salah satu upaya dalam rangka penyebaran resiko perbankan. Sementara itu, perkembangan UMKM di Medan sangat signifikan, yaitu masuk dalam angka lebih dari 250 pengusaha mikro yang tersebar ke dalam beberapa unit usaha, misalnya pedagang kaki lima, kursi rotan, penjahit, dan industry-industri mikro lainnya.

Namun, perkembangan UMKM masih terkendala pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiatkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki.<sup>2</sup>

Di Indonesia saat ini UMKM dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM telah diatur secara undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja

---

<sup>2</sup>Muslimin Karra, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Syariah dan HUKUM Vol. 47, No. 1, Juni 2013.

yang cukup besar bagi kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran.

Selain itu UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha. Persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisonal, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu.<sup>3</sup>

Berdasarkan Data BPRS Al-Washliyah Medan disebutkan bahwa besarnya pembiayaan syariah untuk sektor-sektor ekonomi dan UMKM oleh perbankan syariah di Medan selama bulan Januari-Desember 2018 adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

Besarnya Penyaluran Kredit Sektor Ekonomi dan UMKM oleh Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Medan Januari-Desember 2018

No	Bulan	Pembiayaan Syariah		Kontribusi
		Sektor Ekonomi	UMKM	
1	Januari	985.582	126.354	12.82
2	Februari	1.054.958	134.491	12.74
3	Maret	1.116.459	127.714	11.43
4	April	1.218.590	172.765	14.17

---

<sup>3</sup>Wisber Wiryanto, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banjar baru*, Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Vol 5, No. 1, Maret 2013.

<sup>4</sup>Bapak Syahnun. Wawancara. Bank al-washliyah Medan, pada tanggal 15 Juli pukul 14.00 WIB.

5	Mei	1.266.177	190.603	15.05
6	Juni	1.472.198	349.637	23.74
7	Juli	1.530.724	219.421	14.33
8	Agustus	1.600.218	237.386	14.83
9	September	1.678.388	255.750	15.23
10	Oktober	1.731.223	251.496	14.52
11	November	1.719.493	186.692	10.85
12	Desember	1.699.761	187.990	11.05

Sumber : Data BPRS Al-Washliyah Medan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa selama tahun 2018 (Januari-Desember) besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan syariah untuk sektor-sektor ekonomi dan UMKM di Kota Medan berfluktuasi. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh pembiayaan syariah perbankan terjadi pada bulan Juni 2018 Rp. 349.637.000.000 atau 23.74% dari total kredit yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, meskipun disadari bahwa sektor ekonomi masih mendominasi kredit perbankan syariah dibandingkan dengan UMKM. Pada bulan November dan Desember, kontribusi pembiayaan syariah terhadap UMKM hanya 10.85% dan 11.05%. Secara rata-rata, kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM di Kota Medan selama tahun 2018 sebesar 14.23%.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Berdasarkan hal diatas dilihat bahwa BPRS AL-Washliyah memiliki berpihak kepada UMKM di Medan, namun disisi lain tingkat ketidakberhasilan dari penerima pembiayaan juga cukup besar sehingga, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara dalam terkait dengan persoalan tersebut, artinya dengan pembiayaan yang besar tersebut, bagaimana peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM, oleh karena itu peneliti akan focus pada judul **“PERAN PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun dari latar belakanag masalah yang telah disusun oleh penulis, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi minor ini adalah:

1. Bagaimana Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun Tujuan Penelitian dalam Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor kendala dan solusi BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



Adapun Manfaat penelitian dalam Skripsi ini adalah:

1. Penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki program yang ada dan menjadi bahan masukan untuk Bank Syariah

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan analisisnya adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menekankan pada upaya menemukan dan menguraikan temuan tersebut dengan cara deskriptif analisis. Data-data yang bersifat kualitatif di olah dan dianalisa dalam bentuk uraian-uraian teori yang di dukung dengan beberapa refensi. Dengan demikian maka metode pengumpulan dan analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif..<sup>6</sup>

##### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini, bertempat di PT. BPRS Al-Washliyah Jl. Gunung Krakatau No. 28, Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan. Pada Tanggal 02 Mei 2019 dan pukul 09.00 WIB di Medan

---

<sup>6</sup>Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Granata Publishing, 2013), hlm. 3.

## **E. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, untuk itu sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari obyek penelitian, yaitu data-data tentang peran BPRS Al-Washliyah terhadap UMKM di Medan Timur.

### **2. Data-data yang mendukung pembahasan skripsi. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang peran BPRS Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM.**

Sumber data merupakan orang yang dijadikan sebagai informan. Dalam hal ini yang menjadi sumber data yaitu karyawan BPRS Al-Washliyah sebagai informan:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ibu Tri Auri	Dewan Operasional	Pada tanggal 02 Mei 2019
2.	Bapak Ali	Account Officer	Pada tanggal 02 Mei 2019
3.	Bapak Syahnun	Supervisor	Pada tanggal 02 Mei 2019
4.	Bapak Shaleh	Marketing	Pada tanggal 06 Mei 2019
5.	Kak Kiki	Appraisal (Adm. Pembiayaan)	Pada tanggal 02 Mei 2019

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (*interviewee*) dengan maksud untuk mengkonstruksi kejadian dan kegiatan. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik

pengumpulan data telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, peneliti melakukan Tanya jawab atau wawancara secara tidak terstruktur kepada Pimpinan dan staf BPRS Al-Washliyah.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan memahami yang dikemukakan diatas. Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 Bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm. 157.

- Bab I :           Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, ,  
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode  
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan  
sistematika penulisan skripsi
- Bab II :           Landasan teori, pengetahuan Peran. Pengertian BPRS, tujuan  
BPRS, kegiatan BPRS yang dilarang, produk-produk  
BPRS. Pengertian UMKM, landasan hukum UMKM,  
kriteria UMKM, jenis-jenis UMKM.
- Bab III :          Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini di uraikan  
Biografi dan Profil PT. BPRS Al-Washliyah dan produk-  
produk simpanan sampai pembiayaan, serta mekanisme dan  
prosedur dalam mengajukan simpanan/pembiayaan
- Bab IV :          Temuan dan Pembahasan, merupakan pokok dari kajian  
yang akan diangkat oleh penulis tentang peran BPRS Al-  
Washliyah Medan dalam perkembangan UMKM di Medan.  
Tentang bagaimana peran BPRS Al-Washliyah dalam  
perkembangan serta faktor yang menjadi kendala/hambatan  
dalam mengembangkan UMKM di Medan, serta solusi  
dalam mengembangkan UMKM di Medan dan Pembahasan  
penelitian.
- Bab V :           Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. PERAN**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.<sup>8</sup>

Secara sosiologi peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungan. Peranan merupakan dinamis dari

---

<sup>8</sup>Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hal. 348.

statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang peranan yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>9</sup>

#### **B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 242.

Kemudian undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>10</sup>

### **1. Tujuan Pendirian BPRS**

Terdapat beberapa tujuan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hal 32.

<sup>11</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hal. 129-130.



Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU perbankan No. 1 Tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau pada tabungan pada bank lain.

## **2. Kegiatan BPRS yang dilarang**

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan valuta asing.
- c. Melakukan pernyertaan modal.
- d. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang diboleh dilakukan oleh BPRS.<sup>12</sup>

## **3. Produk-produk BPRS**

Produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah:

- a. Funding (Penghimpunan Dana)

---

<sup>12</sup>Ibid. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 35-36.

Yakni kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari nasabah, internal bank maupun masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan konsep syariah.

1. Tabungan Wadiah

Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

2. Deposito Mudharabah

Akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), bank mengelola dana tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan apabila terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sampai jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

- b. Financing (Penyaluran Dana)

Yakni kegiatan yang dilakukan bank dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana nasabah yang telah terkumpul ke dalam investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dan investasi tersebut, yang diperoleh menurut syariat Islam.

Adapun produk penyaluran dana BPRS yaitu:

---

<sup>13</sup>Ibid. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 37.

#### 1. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali adanya kelalaian atau kesaalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

#### 2. Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam arti al-murabahah, penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

#### 3. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*maal*) dengan kesepakatan jika terdapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terdapat kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### 4. Pembiayaan Istishna

Merupakan kontrak penjualan antara pemebli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah

disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu pada masa yang akan datang.

5. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

Merupakan proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dahulu pembelian suatu barang pesanan nasabah, kemudian nasabah membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati.

6. Pembiayaan Qardhun Hasan

Merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan, namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta pengganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak *qardh*. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam aqd *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>14</sup>

7. Pembiayaan Al-Hiwalah

Merupakan pengalih utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

---

<sup>14</sup>Ibid. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 38.

### **C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang di golongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sector usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.<sup>15</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan berikut:

---

<sup>15</sup>Titik Sartika Partono dan Abd. Rochman Soejono, *Ekonomi Skala Kecil dan Kecil Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), hlm. 16.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>16</sup>

## **1. Landasan hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Untuk memperkuat permodalan, dikeluarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006

---

<sup>16</sup>Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 27.

tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) Pola Syariah.<sup>17</sup>

Ada beberapa perintah ajaran agama Islam agar umatnya melakukan usaha bisnis yaitu:

a. Berbisnis bagian dari kehidupan

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-jumu'ah ayat 10 yang mengatakan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

b. Berbisnis mencari ridha Allah, bukan untung

Kegiatan bisnis bagi umat Islam ditunjukkan tidaklah untuk mencari untung yang besar semata sebab bila pelaku bisnis hanya mengutamakan untung yang besar, maka yang bersangkutan akan terjebak pada mengejar laba baik halal maupun haram atau tidak sah. Berbisnis dalam Islam tidaklah mengutamakan untung besar, tetapi berusaha untuk menyenangkan pelanggan dalam membeli produk kita. Oleh karena itu seorang muslim dalam berbisnis harus ikhlas, dan member kesan baik kepada pembeli.

c. Berbisnis sama dengan manifestasi kerja keras.

---

<sup>17</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 48.

Suatu hasil usaha yang diperoleh dengan cara bekerja keras membanting tulang, mandi keringat merupakan rezeki yang halal dalam ajaran Islam. Suatu kegiatan bisnis merupakan suatu kerja keras, karena ia didahului oleh kepercayaan pada diri sendiri, membuat prestasi dengan sepenuh hati, keberanian menerima resiko, serta memasang niat untuk hanya mencari ridha Allah semata. Dalam kerja keras ini tersembunyi adanya Islam tidak hanya menekankan kerja keras untuk dunia semata, atau untuk akhirat saja, tetapi untuk kedua-duanya. Artinya dalam mencari kehidupan dunia jangan sampai melupakan bekal untuk akhirat.<sup>18</sup>

## **2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Sulistiyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.

- a. UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.
- b. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
- c. Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.

---

<sup>18</sup>Irfadilla, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hal. 50.



- d. UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.<sup>19</sup>

### **3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 :

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

---

<sup>19</sup>Oskar Raja, Ferdy Jalu dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Jakarta: La Press, 2010), hal. 15.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>20</sup>

#### **4. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)**

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok diantaranya:

##### **a. Usaha Perdagangan**

Meliputi keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk local dan Internasional. Sector informasi seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

##### **b. Usaha Pertanian**

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Pertenakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

---

<sup>20</sup>Irvan Hartono, "*Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM*" (Skripsi, Fakultas Ekonomi UNY, 2016), hal. 23.

c. Usaha Industri

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

d. Usaha Jasa

Jasa konsultan yaitu perbangkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.<sup>21</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH**

---

<sup>21</sup>Irfadilla, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hal. 55.

## **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

Periode 1 beroperasi sejak tanggal 08 november 1994, yang semula berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar, sebagai Direktur Utama H.Suprpto dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi,Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.DRS .H.Miftahuddin MBA.

Pada periode II dibentuk nama stuktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama H.T.Kholisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, Drs.H.Miftahuddin MBA.

Alhamdulillah periode III pada tanggal 02 april 2003 kantor PT. BPR Syariah Al-Washliyah telah berpindah di Jalan SM. Raja No. 51D Sp.limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai direktur utama Hidayatullah,SE dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, Drs.H.Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasionalnya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhi pratik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di Jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugrihi pada tanggal 06 januari 2014. Sebagai Komisaris DRS.H.Hasbullah hadi,SH,Mkn dan DRS.H.Miftahuddin MBA. Dewan pengawasan syariah adalah Dr.H.Abd Wahid MA. Sebagi Direktur Utama H.R. Bambang Risbagio,SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti,SE.

## **B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN**

### **1 Visi**

Mewujudkan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai Kesejahteraan Ummat.

### **2 Misi**

- a. Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan
- b. Menjalankan Bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

## **C. PRODUK PERUSAHAAN**

### **1. Pengimpunan Dana**

#### **a. Tabungan Wadiah**

Merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah peminfaat dan titipan ini.

#### **b. Tabungan Mudharabah**

Simpanan nasabah yang di kelolah oleh bank untuk memperoleh keuntungan di bagi sesuai nisbah yang telah di sepakati.

#### **c. Deposito Mudharabah**

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang di tetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

### **2. Produk Pembiayaan/Piutang**

#### **a. Pembiayaan Mudharabah**

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelolaan untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan di bagi hasil sesuai nisbah yang disepakatin.

b. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dengan kerugian ditanggung bersama.

c. Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang tambahan dengan margin/keuntungan yang lebih disepakati awal.

d. Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

e. Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

f. Rahn

Merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan bersifat ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagi piutangnya.

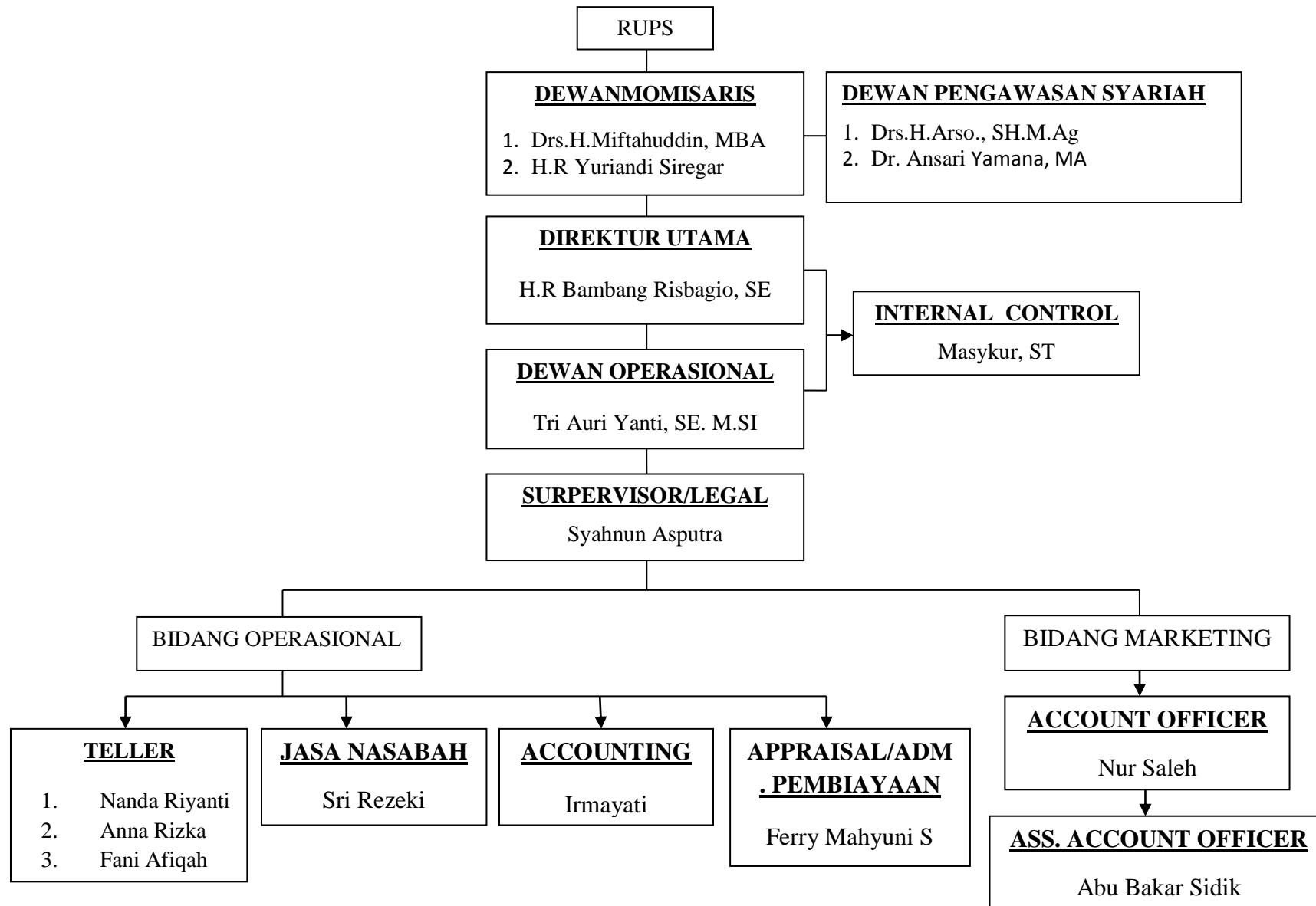
g. Qardh

Merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

h. Qardhul Hasan

Dana kebijakan yang bersal dari Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS).

**D. STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**





## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. TEMUAN PENELITIAN**

##### **1. Peran PT. BPRS Al-Washliyah dalam Mengembangkan UMKM**

Pada dasarnya Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan atau pembiayaan untuk kepentingan mengembangkan usahanya juga mencari dana dari masyarakat juga menyelurkan dan kepada masyarakat, untuk itu bank mempunyai peran yang penting bagi masyarakat yang kelebihan dan maupun yang kekurangan dana.<sup>22</sup>

BPRS Al-Washliyah adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu perkembangan UMKM melalui pembiayaan di Medan. Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan BPRS Al-Washliyah kepada para pelaku UMKM menurut Bapak Ali, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan.<sup>23</sup>

Hal ini dengan bapak ali selaku salah satu karyawan bank alwashliyah ketika ditanyakan kepada beliau apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari BPRS Al-Washliyah? Berikut pak ali menjawab.

---

<sup>22</sup>Hesymi Ali, *Manajemen Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm. 3.

<sup>23</sup>Bapak ali. Wawancara. Bank al-washliyah Medan., pada tanggal 02 mei 2019 pukul 09.30 WIB.

*“jaminan yang berlaku untuk pembiayaan UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB”<sup>24</sup>*

Kemudian juga diutarakan dengan bapak ali, ketika ditanyai lebih lanjut, bagaimana skema pembiayaan yang ditawarkan bank al-washliyah kepada Nasabah UMKM.

*“Di Bank Al-washliyah ini memang untuk UMKM tersebut dia menggunakan Skema Murabahah, akad jual beli, jadi kita membantu nasabah itu, misalnya ada mau membeli kebutuhan apa, yang dimana dia mau menambah asset, atau investasi lalu kita pakai prinsip murabahah. Lebih banyak ke investasi kalau akad murabahah:.*

Selanjutnya masih dengan bapak ali, yang ketika ditanyakan mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap bank al-washliyah, dengan adanya pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, terkhususnya bagi UMKM yang ada di Medan. Berikut jawabannya

*“Respon masyarakat dengan respon positif, yang artinya mereka menyambut baik dengan adanya pembiayaan itu, karena selama ini, yang belum pernah minjam, yang masih takut-takut pinjam ke Bank, mulai bisa berhubungan dan bisa berkerja sama dengan Bank”.*

Pemberian pembiayaan oleh pihak Bank, tentu ada yang melatarbelakanginya, ibu kiki selaku karyawan bank al-washliyah ketika ditanyakan apa yang melatarbelakangi bank al-washliyah memberikan pembiayaan terhadap UMKM. Berikut jawaban beliau

*“Latar Belakang dari pemberian Pembiayaan terhadap UMKM ialah banyaknya UMKM yang tumbuh dan muncul, jadi bagi bank itu melihat suatu potensi untuk dapat meningkatkan portofolio pembiayaan di Bank al-washliyah. Sekaligus untuk membantu masyarakat yang memang memiliki usaha dibidang UMKM. Jadi prinsip nya memang saling membantu”<sup>25</sup>*

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Ibu kiki. Wawancara. Bank al-washliyah Medan, pada tanggal 02 mei pukul 11.00 WIB.

Selanjutnya dengan bapak syahnun karyawan bank al-washliyah ketika ditanyakan untuk mengetahui bagaimana peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

*“Bank al-washliyah itu sebagai lembaga keuangan dimana bank membantu Nasabah yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya, jadi untuk nasabah-nasabah yang memerlukan tambahan modal kerja atau investasi, yang mungkin dalam hal ini yang berkaitan dengan UMKM, jadi Bank bisa memberikan modal usaha atau investasi, maksimal 50 juta untuk setiap calon nasabah kita. Jadi, kami itu memang kita bisa maksimal berikan tambahan modal 50 juta. Melihat kebutuhan dan faktor analisa dari bank. Jadi gak bisa semuanya kita berikan 50 juta, tergantung berapa kebutuhannya, tergantung berapa yang bisa kita berikan”.*

Hal ini senada dengan bapak syahnun juga ketika ditanyakan kepada beliau setelah mendapatkan pembiayaan apa yang dilakukan bank al-washliyah terhadap nasabah UMKM ? Apakah bank al-washliyah terus mengawasi kegiatan UMKM tersebut ?. berikut beliau menjawab

*“Bank melakukan Monotoring, bank memantau pembayarannya, apakah lancar, macat, atau menunggak, kalau misalnya nunggak, itu kita lakukan follow up, biasanya awalnya kita telfon dulu, kita tanya pak buk ini kok belum setor, apa kendala mungkin dia lupa, bisa jadi. Atau tagihannya belum masuk. Tapi kalau itu masih respon positif, kan terkadang ada nasabah yang kita telfon dia gak angkat, nomor telfon gak aktif, jadi kita langsung datang ke lokasi usahanya. Itu salah satu cara penangunan kredit macat itu tadi”.*<sup>26</sup>

## **2. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Setiap kegiatan usaha pasti ada masalah hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UMKM antara lain kurangnya penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat

---

<sup>26</sup>Bapak Syahnun. Wawancara. Bank al-washliyah Medan, pada tanggal 02 mei pukul 13.40 WIB.

rencana serta modal untuk pengembangan. Ada beberapa faktor yang menghambat berkembang UMKM antara lain kurangnya modal, minimnya keterampilan manajemen serta masalah mental.

Kontribusi perkembangan UMKM di Medan bisa dikatakan cukup besar, namun pertumbuhan sektor UMKM di Medan memiliki masalah. Masalah dalam sektor UMKM di Medan dengan masalah UMKM secara nasional yang begitu kompleks, mulai dari masalah Sumber Daya Manusia (SDM), akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen.

Prinsip pembiayaan bank syariah harus memiliki dua aspek, yaitu aspek syariah dan ekonomi. Selain itu harus sesuai syariah, bank syariah juga harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Namun hal ini bukan berarti bahwa bank syariah tidak berpihak pada UMKM, karena bank telah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang juga merupakan strategi bank dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Ini merupakan salah satu kebijakan bank yang baik dalam rangka mengoptimalkan fungsi bank. Bank syariah telah berupaya untuk mengembangkan sektor UMKM melalui pembiayaan. Selain itu juga tercermin dalam kebijakan yang senantiasa mengakomodir kesulitan serta kelemahan UMKM dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada UMKM. Jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah untuk sektor UMKM menjadi salah satu indikatornya.

Secara umum, di atas ditelaah dijelaskan beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan yang dialami pihak bank dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan UMKM di Medan.

Berikut penuturan dengan ibu tri selaku dewan oprasional bank al-washliyah ketika ditanyakan oleh peneliti mengenai hambatan yang dialami dalam mengomptimalkan perkembangan UMKM.

*“Kendala dalam mengoptimalkan usaha adalah. permodalan yang masih menjadi kendala/hambatan karena usaha menengah sampai kecil terbentur modal yang ada dan mereka tidak mendapatkan pembiayaan karena agunan yang diberikan tidak memenuhi syarat”.*<sup>27</sup>

Ibu tri diatas menjelaskan serta memberikan gambaran singkat dan jelas kepada kita bahwa ada beberapa hambatan yang dapat menghambat perkembangan UMKM di Medan. Namun hal tersebut dapat di atasi dengan beberapa solusi yang akan dipaparkan.

Selanjutnya hal senada dengan pertanyaan yang hampir sama sebelumnya kepada ibu tri. Berikut penuturannya

*“Salah satu kendalanya adalah banyaknya bank syariah lain yang menawarkan Produk untuk UMKM, belum lagi ada juga bank konvensional yang terkadang menawarkan produk yang bunga kecil”.*<sup>28</sup>

Jadi sebenarnya menurut ibu tri, tampaknya menjadi alasan yang logis bahwa banyak kendala yang dialami pihak bank dalam mengembangkan UMKM di Medan. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM di Medan adalah permodalan yang belum memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa. Kendala-kendala tersebut harus dicari solusi yang tepat agar bisa diminimalisir sehingga perkembangan UMKM melalui BPRS Al-Washliyah tidak terganggu dan terhambat. Dengan demikian, solusi dari hambatan-

---

<sup>27</sup>Ibu Tri. Wawancara. Bank al-washliyah Medan, pada tanggal 03 mei pukul 15.00 WIB.

<sup>28</sup>*Ibid.*

hambatan yang diuraikan di atas dengan beberapa solusi yang akan dikemukakan pada bagian selanjutnya.

### **3. Solusi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Solusi merupakan upaya pemecahan dari setiap permasalahan yang muncul. Pada bagian sebelumnya secara rinci telah dijelaskan hambatan-hambatan yang muncul dalam mengembangkan UMKM di Medan, sehingga hambatan tersebut membutuhkan solusi agar hambatan tersebut bisa diminimalisir. Ada beberapa solusi yang berhasil dilakukan oleh bank untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Berikut ini solusi yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mengatasi masalah/hambatan tersebut.

*“Solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada Blue Print. Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat”.*

Berikut ini merupakan jawaban yang diberikan oleh ibu tri bank al-washliyah terkait dengan solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan lambatnya perkembangan UMKM di Medan.

*“BPRS Al-Washliyah melakukan promosi, karena kita mungkin untuk Ratenya, untuk marginnya lebih kecil dari yang Bank syariah lain. Jadi itu yang bisa kita unggulkan lah dari bank lain. Itu yang dilakukan agar membuat orang tertarik ke BPRS Al-Washliyah. Promosinya kita tawarkan produk misalnya kita memberikan brosur ke pedagang-pedagang. Ke tempat-tempat usaha UMKM”.*<sup>29</sup>

Jadi sebenarnya di atas merupakan beberapa langkah antisipasi dan merupakan solusi atas beberapa permasalahan yang muncul dalam perkembangan UMKM di Medan. Tentunya dengan harapan UMKM terus

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

berupaya dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda usahanya sehingga pelaku usaha mendapatkan hasil yang maksimal dalam usahanya.

Ini juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak bank, hal ini diketahui setelah ditanyakan kepada bagian marketing bank al-washliyah.

*“Pertama, follow up atau monitoring. Jadi kita ni kan sudah ada sistem yang bisa mengecek dia sudah bayar atau belum bayar. Jadi tugas kita setiap hari itu, kita pantau. Siapa-siapa saja yang belum bayar, jadi kita hubungi. Kita ingatkan lagi, agar dia membayar tepat waktu. Karena kita ada denda juga, denda keterlambatan. Dendanya itu ada hitungannya sendiri, jadi misalnya ada terlambat 1 hari. Tapi denda itu bukan untuk menambah keuntungan bank. Itu hanya untuk memberikan efek jera pada si nasabah. Agar tidak telat membayar. Kedua, melakukan analisa yang baik. Analisa yang dilakukan secara benar, artinya sebelum diberikan pembiayaan, proses awalnya gini, nasabah datang, mohon, jadi yang pertama kita lakukan interview awalnya, apa tujuannya, maksudnya ini pembiayaan untuk apa, beli ini atau untuk menambah modal. Setelah itu baru kita lakukan BI Cheking. Jadi BI Cheking itu untuk memastikan apakah calon nasabah pernah melakukan pinjaman, atau lagi ada pinjaman, dan kualitas pinjamannya. Jadi setelah itu kita tahu lalu kita tentukan jadwalnya, lalu kita lakukan survey, jadi kita survey ke pertama yang kita datangi ialah lokasi usahanya. Baru kita tinjau dimana lokasi agunan yang diberikannya. Misalnya 1 di jalan gaharu medan tempat usahanya, namun lokasi agunanya di Binjai, itu harus kita datangi keduanya. Harus kita pantau dan lihat, tidak boleh tidak. Kan ada dokumentasinya. Jadi kita lihat lokasi usahanya, kita lihat proses usahanya, dan kita wawancari proses produksinya dan segala macam, seperti berapa omsetnya. Setelah informasi itu dapat kita tuangkan ke dalam laporan. Kalau misalnya dari laporan usahanya itu bagus, artinya tidak ada masalah, baru kita bisa cairkan dananya”.*<sup>30</sup>

Berdasarkan jawaban di atas adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak bank untuk menghindari kredit macet oleh pelaku usaha. Jadi, melalui upaya-upaya tersebut telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana prosedur di dalam bank itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan UMKM di Medan. Sehingga peran BPRS Al-Washliyah begitu signifikan dalam mengembangkan UMKM melalui produk-produk

---

<sup>30</sup>Bapak Shaleh. Wawancara. Bank al-washliyah Medan, pada tanggal 06 Mei pukul 16.00 WIB.

dan upaya-upaya sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga BPRS Al-Washliyah menjadi lembaga keuangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Medan.

Dengan demikian solusi yang ditawarkan terhadap kendala-kendala yang dihadapi BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu memberikan pembiayaan agar UMKM di Medan tetap berjalan, mengecilkan nilai agunan, serta mempromosikan pembiayaan Bank al-washliyah di mana rate dari pembiayaan bank al-washliyah itu lebih kecil dari bank yang lain.

## **B. PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. Peran BPRS Al-Washliyah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari tiga hal yang secara signifikan bisa dirasakan masyarakat manfaatnya, yaitu tersedianya produk pembiayaan UMKM, melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta *capital building* UMKM yang akan diberikan pihak Bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha.

- a) Peran yang pertama adalah tersedianya pembiayaan UMKM. BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya. PT. BPRS Al-Washliyah melaksanakan program pemberian pembiayaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk kredit khusus untuk melayani segmen usaha mikro.



b) Peran kedua yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah. Menurut Lukman Dandawijaya “Pengawasan/Monitoring merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterima semula.”<sup>31</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa *monitoring* dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan.

c) Peran ketiga yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu *capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha.

Pendampingan pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan lanjut pada kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi UMKM. Pendampingan pasca kredit ini jika dilihat dari sisi bank adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan terhadap pengembalian kredit. Namun dari sisi bank al-washliyah adalah selain suatu kegiatan monitoring terhadap hasil pendampingan itu sendiri juga sebagai sarana apakah BPRS Al-Washliyah berhasil/tidak dalam menghantar atau menghubungkan UMKM sebagai nasabah yang handal.

---

<sup>31</sup>Lukman Dandawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 37.

Dalam hal pembinaan lanjut, bank dapat menjalin kerjasama untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit, penagihan angsuran, pengumpulan tabungan serta pembinaan-pembinaan lainnya sehubungan dengan permasalahan keuangan lainnya. Namun apabila BPRS Al-Washliyah tidak menghendaki kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, maka bank al-washliyah tetap melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM sampai jangka waktu kredit UMKM tersebut lunas pada bank.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Inilah alasan-alasan yang menghambat bank syariah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Medan adalah: manajemen yang belum teratur, baik internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk dengan bunga yang kecil.

- a. Adakalanya bank tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuan pelaku usaha UMKM dalam menyalurkan pembiayaan yang layak baik dari segi kondisi perekonomian dan kondisi sosial/politik. Namun banyak UMKM yang dalam perkembangannya masih mempunyai keterbatasan dalam modal sehingga perlu pembiayaan untuk Mendukung perkembangan usahanya.

b. Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan

Ketersediaan jaminan merupakan salah satu hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tidak dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan bank.

c. Adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil.

Ini menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM di Medan. Bukan hanya itu, sebagian besar pemilik UMKM menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank. Padahal masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat sebegini besarnya dari UMKM hanya ditangani oleh satu orang. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Mereka tidak kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulan, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap setiap bulannya.

Selain itu, pembiayaan mengenai sistem bank syariah kesemua wilayah masih kurang dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank

syariah masih minim. Masyarakat setempat hanya sedikit yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan pembiayaan bank syariah, sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank-bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.

### **3. Solusi atas Pemasalahan yang dihadapi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa yang menghambat bank syariah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Medan adalah : Manajemen yang belum teratur, baik internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil.

Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Solusi lain dari permasalahan yang muncul adalah BPRS Al-Washliyah melakukan mengecilkan nilai agunan. Dan

melakukan promosi, karena pada bank al-washliyah untuk Ratenya/marginnya lebih kecil dari yang lain.

- a. Memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada *blue print*. Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional dengan memberikan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan UMKM di tengah masyarakat melalui pemberian pembiayaan tersebut.
- b. Mengecilkan nilai agunan. Sehingga dengan begitu dapat membantu pelaku UMKM untuk tidak meminjam dan pada rentenir yang suku bunganya sangat tinggi.
- c. BPRS Al-Washliyah melakukan promosi, karena pada bank al-washliyah untuk Rate/marginnya lebih kecil dari yang lain. Jadi, hal ini bisa menjadi produk unggulan dibandingkan dengan bank lain. Promosi dilakukan secara langsung dengan menawarkan produk ke pedagang-pedagang atau tempat usaha nasabah, serta melakukan analisa yang baik dan secara benar sebelum memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga kelihatan kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan dengan adanya upaya ini dapat mengurangi resiko kredit macet yang menjadi perlambatan pemberian pembiayaan oleh bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM dapat di lihat dari tiga hal, yaitu a) Tersedianya produk pembiayaan UMKM, b) Melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta c) *Capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah.
2. Hambatan BPRS Al-Wasshliyah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Medan adalah: a) permodalan yang belum memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha, b) Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan terlalu besar sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk meminjam uang di bank, serta c) Adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan bank konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan bunga kecil yang menyebabkan terjadinya persaingan di anatar bank tersebut.
3. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada blue print. Perbankan Sayariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan

dalam sistem perekonomian nasional dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha agar UMKM tetap berjalan serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Solusi lain dari permasalahan yang muncul adalah Mengecilkan nilai agunan.. Solusi selanjutnya yaitu Melakukan promosi, karena pada bank al-washliyah untuk Ratenya/marginnya lebih kecil dari yang lain. Jadi, hal ini bisa menjadi produk unggulan dibandingkan dengan bank lain. Promosi dilakukan secara langsung dengan menawarkan produk ke pedagang-pedagang atau tempat usaha UMKM serta, melakukan analisa yang baik dan secara benar sebelum memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga kelihatan kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

## **B. Saran**

Agar peran BPRS Al-Washliyah dalam perkembangan UMKM di Medan dapat berjalan efektif, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank syariah harus lebih fokus dalam mengembangkan UMKM, yaitu dengan memberi kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan.
2. Bank syariah juga harus memberikan pendampingan dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam hal manajemen keuangan, teknik produksi, serta teknologi informasi untuk masuk ke pasar global.

3. Bagi para pelaku UMKM harus lebih kreatif dalam membuat produk agar mampu menembus pasar internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bakir, Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Hesymi Ali, Hesymi. 1997. *Manajemen Bank*. Jakarta: Bina Aksara.
- Irfadilla. 2014. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Karra, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Syariah dan HUKUM. 1(47).
- Lukman Dandawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbanka*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maryati, Sri. 2014. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pendesaan di Sumatera Barat*. Jurnal Of Economic and Economic Education 1(3): 1-17.
- Raja, JF, DV. 2010. *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: La Press.

Sartika Partono, TS dan Soejono, AR. 2002. *Ekonomi Skala Kecil dan Kecil Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Galia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Susanto, Burhanudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tanjung, Hendri. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Granata Publishing.

“Bapak ali”. *Wawancara*: 02 mei 2019, Bank al-washliyah Medan.

“Bapak Shaleh”. *Wawancara*: 06 Mei 2019, Bank al-washliyah Medan.

“Bapak Syahnun”. *Wawancara*: 02 Mei 2019, Bank al-washliyah Medan.

“Ibu kiki”. *Wawancara*: 02 mei 2019, Bank al-washliyah Medan.

“Ibu Tri”. *Wawancara*: 03 Mei 2019, Bank al-washliyah Medan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS**

- B. Nama : Isna Fadhillah
- C. NIM : 0504163155
- D. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 17 September 1998
- E. Pekerjaan : Mahasiswa
- F. Alamat : Jln. Gaharu Gg. Sekolah No. M2

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 1. Tamatan TK Aisyiah pada tahun 2004
- 2. Tamatan SD Swasta Medan Putri pada tahun 2010
- 3. Tamatan SMP Swasta Panca Budi Medan pada tahun 2013
- 4. Tamatan SMK-BM Swasta Panca Budi Medan pada tahun 2016

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

- 1. Nama Ayah : Drs. Hasbi Dasopang
- 2. Nama Ibu : Elly Efnita
- 3. Pekerjaan Ayah : Guru Swasta
- 4. Pekerjaan Ibu : Berdagang
- 5. Alamat : Jln. Gaharu Gg. Sekolah No. M2